



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI KALIMANTAH TENGAH

KATA PENGANTAR

Terselenggaranya Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pra syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk hal ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Guna memenuhi hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 juga berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta kepada masyarakat/publik.

Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah ini kami ucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Palangka Raya, Januari 2024



**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**DY H. M. KATMA F. DIRUN. SE., MM.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661022 199308 1 001**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Bab I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Gambaran Umum Organisasi.....	5
E. Isu-Isu yang Dihadapi.....	11
F. Sistematika Penulisan	14
Bab II. Perencanaan Kinerja	
A. Perencanaan Kinerja	16
B. Visi.....	16
C. Misi.....	17
D. Perjanjian/Penetapan Kinerja.....	21
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran.....	38
Bab IV. Penutup	
A. Kesimpulan.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, tertulis bahwa laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu Instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Instansi yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Kepala PD selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikannya kepada Gubernur / Bupati / Walikota dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas beserta pasal-pasal yang telah disebutkan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga kepada masyarakat atau publik.

B. Dasar Hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dan dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/532/2022 tanggal 29 Desember 2022, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.
18. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/411/2023 tanggal 06 Oktober 2023, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasinya.
2. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada masyarakat.
3. Sebagai dasar untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program, dan kegiatan periode yang akan datang.
4. Untuk penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Gambaran Umum Organisasi

1. Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2013 Badan Kesatuan Bangsa mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada tahun 2018 diperbarui dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Tugas, fungsi dan Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka tugas, fungsi dan struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Kesatuan bangsa dan Politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- 1) Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia pada Badan;
- 3) Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis;
- 4) Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

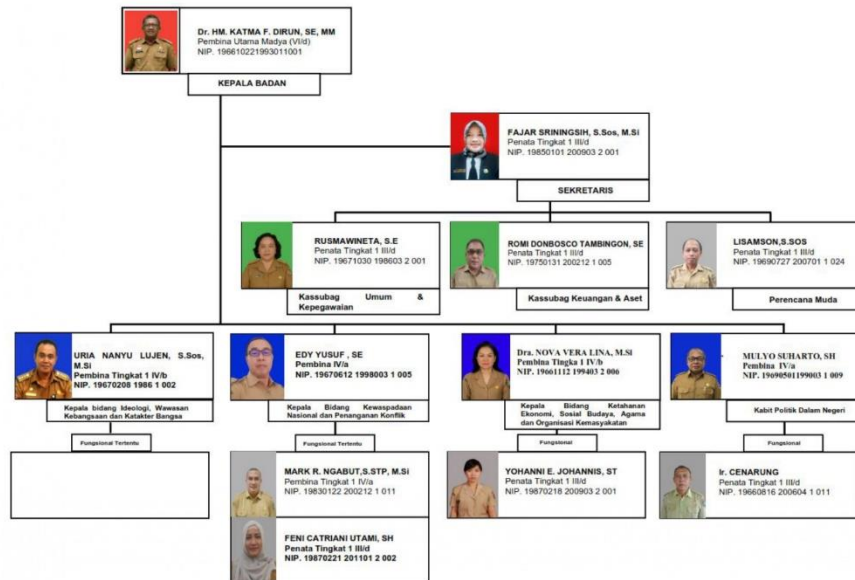
3. Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; kemudian Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah; dan terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahkan :
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan :
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan :
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan :
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah



4. Sumber Daya PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber daya PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SLTA atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Sarjana S2. Komposisi ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel berikut :

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S-3	1
2	S-2	4
3	S-1	20
4	D-4	1
5	D-3	1
6	SMA/Sederajat	3
7	SMP/Sederajat	0
Total		30

Dari jumlah 30 orang komposisi ASN berdasarkan kualifikasi pangkat dan golongannya dapat dilihat di tabel berikut :

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat / Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1	II	2
4	III	21
8	IV	7
Total		30

Komposisi ASN berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban sebagaimana tabel berikut :

**Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan
Struktural dan Fungsional**

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	2
4	Fungsional Tertentu	6
5	Pelaksana	16
Total		30

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang didalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Sarana dan prasarana yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari APBD. Sarana dan Prasarana yang dimiliki sebagai berikut :

Sumber Daya Berupa Sarana dan Prasarana

KIB	Nama Barang Inventaris	Jumlah s/d Tahun 2023
1	2	3
	ASET TETAP	
KIB A	Tanah	685.000.000
	Tanah	685.000.000

KIB B	Peralatan dan Mesin	3.231.849.923
	Alat-Alat Angkutan	1.073.168.208
	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	913.009.525
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	162.045.890
	Alat Keamanan	21.300.000
	Komputer	1.062.326.300
KIB C	Gedung dan Bangunan	1.868.319.672
	Bangunan Gedung	1.868.319.672
KIB D	Jalan, Irigasi dan Instalasi	375.100.000
	Instalasi	375.100.000
KIB E	Aset Tetap Lainnya	626.769.200
	Buku dan Perpustakaan	61.839.200,00
	Tanaman Hortikultura	24.750.000
	Aset Tetap dalam Renovasi	540.180.000,00
	Jumlah I	6.787.038.795
	ASET LAINNYA	
1	Aset Tidak Berwujud	98.512.500
2	Aset yang akan dihibahkan	-
3	Aset Lain-Lain	362.163.392,00
	- Rusak Berat	362.163.392,00
	Jumlah II	460.675.892
	TOTAL = JUMLAH I+II+III	7.247.714.687

E. Isu-Isu Strategis Yang Dihadapi

Kalimantan Tengah dengan ibukotanya adalah Kota Palangka Raya terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota memiliki luas 157.983 km² dan berpenduduk sekitar 2.490.178 jiwa, yang terdiri atas 1.299.013 laki-laki dan 1.191.165 perempuan (hasil SUPAS 2015).

Dengan luasan wilayah tersebut Provinsi Kalimantan Tengah didiami berbagai macam suku bangsa dari seluruh wilayah di Indonesia. Suku asli dan dominan di Kalimantan Tengah yaitu Suku Dayak, sedangkan suku dominan lainnya yakni Suku Banjar dan Suku Jawa. Dari

segi agama di Provinsi Kalimantan Tengah juga terdapat 5 agama nasional yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu serta terdapat kepercayaan lokal yakni Kaharingan yang merupakan kepercayaan penduduk asli Kalimantan Tengah.

Adanya keanekaragaman suku, budaya, agama dan partai politik serta berbagai jenis kelembagaan tersebut menjadikan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah yang cukup rawan terjadinya perselisihan antar suku dan agama serta gesekan-gesekan yang berpotensi terjadinya konflik.

Masalah ketentraman dan ketertiban umum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kehidupan politik yang diarahkan untuk mewujudkan demokrasi masih dimaknai sebagai kebebasan semata oleh sebagian masyarakat yang seringkali dapat mengganggu kelompok masyarakat lainnya yang mempengaruhi kondisi ketentraman dan ketertiban umum. Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Permasalahan keamanan dan ketertiban umum yang ditemui adalah masih tingginya jumlah tindak pidana di Provinsi Kalimantan Tengah. Data menunjukkan pada tahun 2021 jumlah tindak pidana kriminalitas di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 2.626 kasus (Sumber data : Polda Kalteng).

Upaya penurunan konflik dilakukan dengan melakukan pemilihan strategi, kebijakan, dan program yang tepat dengan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan organisasi (mitra kerja) yang dibentuk untuk keperluan tersebut seperti Forum

Koordinasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Sekecil apapun isu yang berpotensi menimbulkan konflik yang berdasarkan hasil deteksi dini akan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan atau aksi dalam pencegahan dini. Namun demikian jika konflik terjadi maka akan diusahakan agar cepat diselesaikan secara optimal agar tidak berdampak luas.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

a. Pendidikan politik masyarakat masih rendah

Dapat dilihat dari menurunnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada di Kalimantan Tengah serta potensi konflik-konflik yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilukada.

b. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun

Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan semakin maraknya *conflict and communal violence* (konflik dan kekerasan komunal) di tengah masyarakat, seperti tawuran antar warga dan pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat.

c. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat

Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan ekses-ekses negatif dengan munculnya modus- modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi

canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini adalah berikut ini :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, beserta gambaran umum organisasi dan juga sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023 antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan Gubernur Kalimantan Tengah.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta anggaran dan realisasi yang digunakan dalam mewujudkan outcome kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran-lampiran

Dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Dalam pencapaian kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan rencana strategis yang mana pada hakekatnya merupakan suatu program kerja yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana jangka menengah atau lebih dikenal sebagai Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah.

B. Visi

Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: **“Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”**.

C. Misi

Misi Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

Dalam hal ini, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang terkait langsung dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, adalah sebagai berikut:

1. Misi ke 2 **“Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global”**.

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan bencana. Beberapa bencana yang sudah pernah terjadi, seperti bencana Tanah Longsor, Banjir, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung dan Gelombang genangan air pasang ROB), Kegagalan Teknologi, Epidemik dan Wabah Penyakit maupun bencana sosial. Dalam rangka penguatan dan ketangguhan daerah perlu adanya antisipasi dampak bencana berupa investasi menghadapi bencana baik pada tataran siaga bencana, tanggap bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Investasi menghadapi bencana sangat diperlukan guna mitigasi

risiko dan meminimalisir dampak bencana. Bencana tidak mungkin kita hindari dan kerugian akibat bencana tidak bisa dikesampingkan. Namun demikian, semakin siap dalam menghadapi bencana maka risiko yang timbul bisa diminimalisir. Kesiapan menghadapi bencana juga menjadikan proses pemulihan pasca bencana semakin cepat. Pada akhirnya ketahanan pasca bencana akan menguat.

Penguatan ketahanan Daerah merupakan cara untuk menunjukkan bahwa daerah atau negara dalam upaya penguatan masyarakat (*community building*), pengembangan wawasan kebangsaan, dan pembangunan nasional harus menyasar pada aset dan modal sosial masyarakat. Aset dan modal sosial ini fokus pada penguatan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan dan adat istiadat masyarakat lokal Kalimantan Tengah. Potensi tersebut akan maksimal bila strategi dan pendekatan yang digunakan adalah *community building*.

Community building yang dimaksud adalah sebuah pendekatan dalam mengatasi masalah dan menciptakan peluang pengembangan bagi komunitas lokal dalam mengantisipasi perubahan dan ancaman perubahan global. Implementasinya adalah dengan membangun komunitas mulai level keluarga; para keluarga saling belajar untuk saling bergantung dan bekerja bersama untuk hal-hal tertentu yang dapat menciptakan kesadaran diri yang baru terkait dengan aset mereka, baik kolektif maupun individual. Dalam prosesnya, kerja bersama antar keluarga akan menciptakan modal sosial, kekeluargaan dan kemanusiaan. Modal tersebut akan menyediakan landasan baru bagi masa depan yang lebih menjanjikan. Melalui kerja bersama tersebut, para keluarga yang terikat sebagai kesatuan komunitas kemudian bisa membangun koneksi kembali

(*reconnection*) dengan cita-cita (wawasan) kebangsaan untuk menghadapi persaingan dan ancaman globalisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 2, dirumuskan sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan, dan pusat-pusat kebudayaan beserta penguatan tokoh lintas agama sebagai penggerak peradaban dan pilar pembentuk kemajemukan;
- b. Melakukan pendampingan terhadap Komunitas Adat untuk memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat;
- c. Memperkuat masyarakat tahan bencana melalui mitigasi dan manajemen kebencanaan termasuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak covid-19;
- d. Mempercepat pengembangan Kawasan food estate dan penguatan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan potensi dan keunggulan lokal.

2. Misi ke 5 “**Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender**”.

Pembinaan nilai-nilai religius atau keimanan sangat penting bagi masyarakat heterogen. Kalimantan Tengah yang heterogen tentu memiliki landasan filosofis yang kuat tentang kehidupan beragama. Nilai-nilai religius yang terkandung dalam setiap sikap dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara seharusnya menjadi perekat dalam menjalani kehidupan di tengah heterogenitas masyarakat Kalimantan Tengah yang memang dikenal memiliki keanekaragaman dalam hal suku, agama, ras serta golongan. Keanekaragaman ini patutlah menjadi kekayaan yang memberi warna bagi kehidupan masyarakat dan bukan menjadi sumber

perpecahan dan konflik. Kalimantan Tengah sudah belajar banyak mengenai konflik horizontal dengan berbagai isu yang berkembang, sehingga sudah saatnya untuk merancang suatu strategi dan model kehidupan masyarakat yang tenteram dan nyaman di tengah heterogenitas dan pluralisme bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu, pembinaan nilai luhur yang terkandung dalam agama dan budaya perlu dilakukan melalui berbagai upaya, seperti melalui proses pendidikan agama, latihan dan pembiasaan dan peneladanan. Dalam konteks sosio kultural, pendidikan merupakan proses untuk membudayakan nilai-nilai.

Selain meningkatkan peran religiusitas masyarakat dan nilai-nilai budaya local prosem pembangunan Kalimantan Tengah juga memperhatikan aspek-aspek kesetaraan gender. World Bank menyebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan komponen pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan secara efektif. Dalam konteks itulah jika negara kita mau membangun pemerintahan yang maju setidaknya memperhatikan masalah secara khusus yang berkaitan dengan kesetaraan gender (World Bank, 2001). Oleh sebab itu, kebijakan yang berwawasan gender sangat diperlukan, maka setiap pelaksanaan program selalu menggunakan indicator atau pertimbangan keseimbangan peran dan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan pendekatan ini pula setiap pelaksanaan program akan selalu menunjukkan bentuk kesetaraan, keadilan, demokratis dan transparansi yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 5, dirumuskan sebagai berikut :

- a. Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal falsafah Huma Betang (Rumah Besar);
- b. Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damai;
- c. Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- d. Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;

Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

D. Perjanjian/Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai target kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Daerah dengan Kepala PD dalam hal ini adalah Gubernur dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Penetapan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan :

1. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dalam hal ini adalah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.
2. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan dalam hal ini adalah Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
3. Dokumen Penganggaran dan atau Pelaksanaan Anggaran dalam hal ini adalah APBD Tahun 2023.

Tujuan disusun dan ditetapkannya Perjanjian Kinerja Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah untuk :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
3. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Menilai keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi.

Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	Nilai / Angka	78,5

2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	Persen	80%
3.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	orang	200
4.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	Persen	80%
5.	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	orang	200
6.	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100%

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan perjanjian kinerja tersebut sebagaimana Table berikut :

**Jumlah Anggaran Program Pendukung
Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	11.253.864.501	
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.568.498.116	
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	52.307.421.955	
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	592.173.838	
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.613.933.628	
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan	11.165.836.100	

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	74 - 100%	Baik
3	55 - 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Satuan	Target Realisasi Kinerja (%)		Kategori
					Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Jumlah	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik	78,5	Nilai / Angka	79,3	101,02%	Sangat Baik

	Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Provinsi Kalimantan Tengah					
2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	80%	Persen	117,87%	147,34%	Sangat Baik
3	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	200	orang	1300	650%	Sangat Baik
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	80%	Persen	15,625%	19,53%	kurang
5	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	200	orang	240 orang	120%	Sangat Baik

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan awal periode Rencana Strategis (2023-2026). Selain itu juga dikarenakan perbedaan target capaian kinerja yang akan dicapai dengan Rencana Strategis periode sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA (Kumulatif)	Realisasi 2023	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	79,25	79,3	100,06%
2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	95%	117,87%	124,078%
3	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	200 orang	1300 orang	650%
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	80 %	15,625%	19,53%
5	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	200 orang	240 orang	120%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2023 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah

melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana telah disusun didalam Rencana Kerja Tahun 2023.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	78,5	79,3	101,02%	Hal-hal yang mempengaruhi tercapainya target dikarenakan meningkatnya total nilai dari masing-masing aspek penilaian, antara lain: - Aspek Kebebasan, terdapat peningkatan dari nilai tahun 2021 sebesar 76,09 menjadi 82,05 pada tahun 2022; - Aspek Kesetaraan, pada tahun 2021 mendapat nilai sebesar 75,07 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 77,61; - Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, nilai pada tahun 2021 sebesar 68,02 meningkat menjadi 76,62 pada tahun 2022.
2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	80%	117,87%	147,34%	-Kegiatan Rapat Koordinasi Pelayanan Tata Kelola dan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yang diadakan di Aula Eka Hapakat Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang diikuti peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang yang merupakan pejabat administrator / pengawas / fungsional / pelaksana teknis yang membidangi Tata Kelola dan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Tengah -melaksanakan kegiatan Silaturahmi Kerukunan Umat Beragama dalam Rangka Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang Aman, Damai dan Harmoni di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kegiatan ini sebagai upaya dalam koordinasi, sinergitas dan kerja sama seluruh komponen masyarakat dan peran dan tugas fungsinya masing-masing dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 -Kegiatan Dialog Pembinaan dan Peningkatan Peran serta Keterlibatan Ormas sebagai Mitra Pemerintah Dalam Menyukseskan Pemilu Tahun

						<p>2024 bertempat di Aula Eka Hapakat Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan, peningkatan peran serta dan kerjasama Ormas sebagai mitra pemerintah; Meningkatkan sinergi dan kerja sama ormas untuk menyiapkan masyarakat untuk semakin memiliki kepedulian dan berpartisipasi dalam pemantapan Pemilu 2024 dimana bentuk partisipasinya dari waktu ke waktu diharapkan menghadirkan kondisi yang aman, damai, harmoni; meningkatkan peran serta keterlibatan Ormas yang merupakan wadah berhimpun bagi masyarakat sipil di Kalimantan Tengah sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas tahun 2024; sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan peran Ormas sesuai bidangnya, untuk memperkuat perastuan dan Kesatuan bangsa khususnya dalam menyambut Pemilu tahun 2024.</p>
3	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	200	1300 orang	650%	<p>-kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menjaga Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Berkeadilan yang diikuti oleh 100 orang peserta yang merupakan Siswa/i SMA/SMK yang ada di Palangka Raya beserta guru pendampingnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan kepada peserta tentang nilai-nilai Pancasila dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadikan sumber daya manusia Indonesia khususnya generasi muda di Kalimantan Tengah agar berwawasan Pancasila, memiliki jiwa Nasionalisme dan Patriotisme, memberikan arah kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan dan fasilitasi dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, Menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda bahwa Pancasila adalah Ideologi yang mempersatukan NKRI.</p>

						<p>-Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan Tema "Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Melalui Keluarga dan Lingkungan Hidup dalam Berbangsa dan Bernegara" dengan jumlah peserta yang diundang sebanyak 100 orang</p> <p>-Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi tenaga Pendidik Tahun 2023 dengan tema "Membulatkan Tekad untuk Tetap Mempertahankan dan Mengamalkan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Peringatan Hari Kesaktian Pancasila bagi Tenaga Pendidik dan Generasi Muda", yang diikuti oleh 100 (seratus) orang peserta</p> <p>-kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) Tahun 2023 yang diikuti 1000 (seribu) orang peserta perwakilan dari kabupaten/kota se Kalimantan Tengah. Maksud kegiatan ini yaitu untuk Meningkatkan rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara, melalui kegiatan kepemudaan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuannya menggali nilai-nilai perjuangan pemuda dalam Gerakan perintis dan pergerakan kemerdekaan Indonesia, untuk dapat diimplementasikan pada masa Pembauran dan Pembangunan bangsa saat ini dan akan datang serta Menjalin Kembali nilai-nilai Kebangsaan dan persatuan di kalangan muda khususnya selaku agen pembangunan dan perubahan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.</p>
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	80%	15,625%	19,53%	Data yang telah dikumpulkan dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 32 permasalahan yang memiliki potensi menjadi konflik dimasyarakat, 5 permasalahan telah dapat diselesaikan (15,625%) dan sisanya sedang dalam proses tindak lanjut penyelesaian.
5	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	200	240 orang	120%	-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

	Ekonomi, Sosial Dan Budaya	ketahanan ekonomi, sosial dan budaya			<p>(P4GN dan PN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang merupakan pejabat administrator / pengawas / fungsional / pelaksana teknis yang membidangi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> -kegiatan Sosialisasi P4GN <i>Goes to School</i> bertempat di Aula SMK N 1 Palangka Raya dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang yang merupakan murid dan guru pendamping SMK N 1 Palangka Raya. -kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Kegiatan tersebut diikuti oleh Sekretaris / Pejabat Adminsitrator bersama pengawas / fungsional / pelaksana teknis yang membidangi Penyusunan Program / Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika pada seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. -Dialog Kebersamaan dalam Keberagaman bagi Generasi Muda, bersama dengan Organisasi Kepemudaan/ Kemahasiswaan/Mahasiswa(i) Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, yang ada di Kota Palangka Raya, dengan tema "Unity in Diversity, Huma Betang Goes to Campus" -Penguatan Komunitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Anti Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bukti komitmen nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika di Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, Tanah Berkah untuk Indonesia -<i>Launching</i> Aplikasi Indeks Ketahanan Ekonomi Aplikasi
--	----------------------------	--------------------------------------	--	--	---

						<p>Indeks Kerawanan Sosial yang akan digunakan untuk peningkatan kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Upaya ini juga untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Manfaat dari aplikasi adalah untuk menunjang dan mempermudah pemetaan pemerintah daerah terutama terkait situasi ketahanan ekonomi dan kerawanan sosial yang dibuat secara digitalisasi dalam bentuk aplikasi.</p>

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran dan realisasi sumber daya keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Capaian
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	78,5	79,3	101,02	52.307.421.955	41.553.946.839	79,44	(20,56)
2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	80%	117,87%	147,34	592.173.838	536.671.077	90,63	(9,37)
3	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	200	1300 orang	650	2.568.498.116	2.295.846.500	89,38	(10,62)
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	80%	15,625%	19,53	11.165.836.100	8.430.759.284	75,50	(24,50)
5	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	200	240 orang	120	1.613.933.628	1.443.337.584	89,43	(10,57)

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Untuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah, data capaian yang ditampilkan merupakan data skor IDI Tahun 2022. Hal ini dikarenakan penilaian Skor IDI baru dilakukan setelah berakhirnya masa Tahun Anggaran yang bersangkutan. Capaian Skor IDI Tahun 2022 yang telah di *release* sebesar 79,30 dengan rincian :

- | | |
|------------------------------|-------|
| i. Aspek Kebebasan | 82,05 |
| ii. Aspek Kesetaraan | 77,61 |
| iii. Aspek Kapasitas Lembaga | 78,62 |

(sumber data : BPS Kalimantan Tengah)

Skor IDI Kalimantan Tengah Tahun 2022 melebihi target pencapaian tahun 2022 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 78.50. Skor IDI Kalimantan Tengah Tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan skor IDI Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang sebesar 73,17 (terdapat kenaikan sebesar 6,13 poin).

b. Indikator Kinerja Utama Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (Persen). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat.

Pada Triwulan I Tahun 2023, bidang terkait melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pelayanan Tata Kelola dan Pendaftaran Organisasi Masyarakat yang diadakan di Aula Eka Hapakat Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang diikuti peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang yang merupakan pejabat administrator / pengawas / fungsional / pelaksana teknis yang membidangi Tata Kelola dan Pendaftaran Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Tengah. Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a) Sebagai salah satu upaya konstruktif dalam membangun kembali peran Ormas melalui Pelayanan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan pintu gerbang bagi legalitas dan pengakuan Pemerintah terhadap keberadaan Ormas,
- b) Salah satu upaya mengoptimalkan pelayanan pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum, sekaligus upaya menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan data Ormas,
- c) Sinergitas Koordinasi dan kerja sama yang baik serta standar dan persepsi yang sama sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat dan dalam menyikapi permasalahan sosial kemasyarakatan, mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada Tanggal 12 Juni 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Silaturahmi Kerukunan Umat Beragama dalam Rangka Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang Aman, Damai dan Harmoni di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kegiatan ini sebagai upaya dalam koordinasi, sinergitas dan kerja sama seluruh komponen masyarakat dan peran dan tugas fungsinya masing-masing dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

Pada Tanggal 19 September 2023, telah dilaksanakan Kegiatan Dialog Pembinaan dan Peningkatan Peran serta Keterlibatan Ormas sebagai Mitra Pemerintah Dalam Menyukseskan Pemilu Tahun 2024 bertempat di Aula Eka Hapakat Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan, peningkatan peran serta dan kerjasama Ormas sebagai mitra pemerintah; Meningkatkan sinergi dan kerja sama ormas untuk

menyiapkan masyarakat untuk semakin memiliki kepedulian dan berpartisipasi dalam pemantapan Pemilu 2024 dimana bentuk partisipasinya dari waktu ke waktu diharapkan menghadirkan kondisi yang aman, damai, harmoni; meningkatkan peran serta keterlibatan Ormas yang merupakan wadah berhimpun bagi masyarakat sipil di Kalimantan Tengah sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas tahun 2024; sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan peran Ormas sesuai bidangnya, untuk memperkuat perastuan dan Kesatuan bangsa khususnya dalam menyambut Pemilu tahun 2024.

- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang). IKU tersebut diterjemahkan pelaksanaannya melalui program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Pada tanggal 23 Februari 2023 telah dilaksanakan kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menjaga Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Berkeadilan yang diikuti oleh 100 orang peserta yang merupakan Siswa/i SMA/SMK yang ada di Palangka Raya beserta guru pendampingnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan kepada peserta tentang nilai-nilai Pancasila dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadikan sumber daya manusia Indonesia khususnya generasi muda di Kalimantan Tengah agar berwawasan Pancasila, memiliki jiwa Nasionalisme dan Patriotisme, memberikan arah kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan dan fasilitasi dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, Menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda bahwa Pancasila adalah Ideologi yang mempersatukan NKRI.

Pada tanggal 06 Maret 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dengan tema **“Pemberdayaan dan Penguatan Bela Negara dalam Menjaga Pemilu dan Pilkada Serentak yang Damai dan Berkeadilan”** yang diikuti oleh 100 orang peserta yang merupakan perwakilan dari Resimen Mahasiswa universitas/Institut/Sekolah Tinggi yang ada di Palangka Raya, Banser NU, PPI, FKPPI, Pemuda Pancasila, BATAMAD, GERDAYAK, DUSMALA. Kegiatan ini bertujuan untuk :

- i. Membangun sikap dan perilaku serta karakter setiap warga negara Indonesia yang cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara serta nantinya memiliki kemampuan awal Bela Negara,
- ii. Meningkatkan pengetahuan, memiliki tekad, sikap dan perilaku serta Tindakan bela negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, nilai dasar bela negara, dan nilai dasar kewarganegaraan dalam rangka membentuk karakter bangsa yang ulet, Tangguh, berwawasan kebangsaan dan memiliki kesadaran bela negara dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Pada Tanggal 04 Oktober 2023, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi tenaga Pendidik Tahun 2023 dengan tema **“Membulatkan Tekad untuk Tetap Mempertahankan dan Mengamalkan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Peringatan Hari Kesaktian Pancasila bagi Tenaga Pendidik dan Generasi Muda”**, yang diikuti oleh 100 (seratus) orang peserta bertempat di Aula Eka

Hapakat, Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai berikut:

- i. Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- ii. Mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
 - i. Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

Tanggal 28 Oktober 2023, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 95, dilaksanakan kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) Tahun 2023 yang diikuti 1000 (seribu) orang peserta perwakilan dari kabupaten/kota se Kalimantan Tengah. **Maksud** kegiatan ini yaitu untuk Meningkatkan rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara, melalui kegiatan kepemudaan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan **tujuannya** menggali nilai-nilai perjuangan pemuda dalam Gerakan perintis dan pergerakan kemerdekaan Indonesia, untuk dapat diimplementasikan pada masa Pembauran dan Pembangunan bangsa saat ini dan akan datang serta Menjalin Kembali nilai-nilai Kebangsaan dan persatuan di kalangan muda khususnya selaku agen pembangunan dan perubahan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

- d. Indikator kinerja utama Potensi Terjadinya Konflik Terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentasi Kasus yang telah

Ditangani). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 16 Maret 2023 melaksanakan kegiatan rapat Fasilitasi Pengendalian Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial (RAD PKS) yang bertempat di Aula Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Gedung C Kementerian Dalam Negeri RI. Acara ini diikuti oleh perwakilan dari Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam Penyusunan dan Pelaporan RAD-PKS Kabupaten/Kota dan RAD-PKS Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat berjalan sesuai ketentuan serta mendorong pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di daerah agar lebih maksimal dan tepat arah.

Pada Tanggal 13 Juli 2023 bertempat di Ruang Seruyan I M Balahap Hotel Jl. RTA. Milono Km. 1,3 Kota Palangka Raya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan “Sosialisasi dan Dialog Pengintegrasian Kurikulum Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dalam lingkup Pendidikan Formal dan Non Formal yang diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari Perangkat Daerah/Instansi Vertikal terkait Rencana Aksi Daerah Penanggulangan dan Pencegahan Terorisme; Pimpinan Perguruan Tinggi; Kepala Sekolah Tingkat Menengah maupun Tingkat Atas; dan Penyuluh Agama. Dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan adanya tindak lanjut berupa penyusunan modul belajar pengintegrasian kurikulum esktrermisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam lingkup pendidikan formal dan non formal untuk menangkal ektremisme. Pengintegrasian tersebut

merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN PE)

Pada Tanggal 14 September 2023, telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penggulangan Esktrermisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Kabupaten Gunung Mas. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pemahaman masyarakat terhadap aksi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dini di lingkungan masyarakat Kabupaten Gunung Mas menuju suksesnya pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 50 orang yang terdiri dari Damang/Mantir; Ketua Forum mitra Kesbangpol; Ketua Organisasi/Yayasan/Lembaga Masyarakat Adat, Agama, dan Kepemudaaan se Kabupaten Gunung Mas; dan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

Pada Tanggal 30 November 2023 bertempat di Aula Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini di daerah untukantisipasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di daerah menjelang pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Pada tanggal 01 Desember 2023, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pemantauan Orang Asing se Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait pelaksanaan pemantauan orang asing dan lembaga asing/*non government Organization* di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk melihat secara seksama dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing/NGO yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan mereka sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak membahayakan keamanan dan kedaulatan negara. Langkah tersebut diambil karena adanya potensi risiko dan tantangan dari kehadiran orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing/NGO. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat dalam menghadapi kegiatan mereka.

Data yang telah dikumpulkan dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 25 permasalahan yang memiliki potensi menjadi konflik dimasyarakat, 7 permasalahan telah dapat diselesaikan (28%) dan sisanya sedang dalam proses tindak lanjut penyelesaian.

- e. IKU Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (orang). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
 - i. Pada bulan Maret 2023 telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang merupakan pejabat administrator / pengawas / fungsional / pelaksana teknis yang membidangi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik se Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut merupakan upaya optimalisasi pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi semua pemangku kepentingan terkait di daerah dan pemanfaatan seluruh potensi dalam rangk P4GN dan PN, dan meningkatkan sinergitas, koordinasi dan kerja sama yang baik serta membangun persepsi dan komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika di daerah khususnya dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN dan PN.

- ii. Pada Tanggal 29 Mei 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Sosialisasi P4GN *Goes to School* bertempat di Aula SMK N 1 Palangka Raya dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang yang merupakan murid dan guru pendamping SMK N 1 Palangka Raya.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk membentuk generasi muda sebagai Agen Perubahan, Panutan dan Role Model dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dengan cara memberikan pemahaman aau penguatan bagi generasi muda sebagai agen perubahan dalam membangun bangsa mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)

dalam mendukung Pembangunan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga mewujudkan generasi muda Sehat dan Cerdas tanpa Narkoba.

- iii. Pada Tanggal 14 September 2023, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Kegiatan tersebut diikuti oleh Sekretaris / Pejabat Adminsitrator bersama pengawas / fungsional / pelaksana teknis yang membidangi Penyusunan Program / Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika pada seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa hasil yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain
- Optimalisasi Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN);
 - Peningkatan peran Perangkat Daerah untuk membuka ruang bagi semua pemangku kepentingan terkait, di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tnegah serta pemanfaatan seluruh potensi dalam rangka optimalisasi P4GN dan PN;
 - Sinergitas, koordinasi dan kerjasama yang baik serta membangun persepsi dan komitmen bersama dalam Optimalisasi P4GN khususnya dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN dan PN sehingga menjadi bentuk aksi nyata terhadap pencegahan dan

pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) di Provinsi Kalimantan Tengah.

iv. Pada Tanggal 24 November 2023, dilaksanakan Dialog **Kebersamaan dalam Keberagaman** bagi Generasi Muda, bersama dengan Organisasi Kepemudaan/ Kemahasiswaan/Mahasiswa(i) Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, yang ada di Kota Palangka Raya, dengan tema ***“Unity in Diversity, Huma Betang Goes to Campus”***. Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Memelihara dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pengamalan Falsafah Kehidupan Masyarakat Kalimantan Tengah “Huma Betang” sebagai refleksi kehidupan masyarakat yang toleran.
- Mempersiapkan dan memberikan bekal bagi Generasi Muda sebagai “tongkat estafet” Pembangunan di masa yang akan datang, dalam menyongsong Indonesia Emas serta Bonus Demografi Tahun 2045
- Generasi Muda dalam berbagai aktivitas serta sesuai kompetensi yang dimiliki, dapat bersinergi bersama dengan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan rasa kesadaran Berbangsa, Bernegara, Kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah dan aspirasi perjuangan masa lampau, dalam menghadapi tantangan global saat ini, dan

mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini Nilai-nilai budayanya yang akhirnya membentuk karakter bangsa

- v. Pada Tanggal 28 Desember 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 2 agenda kegiatan pada saat bersamaan yaitu **pertama**, Penguatan Komunitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Anti Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bukti komitmen nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika di Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, Tanah Berkah untuk Indonesia; **kedua**, *Launching* Aplikasi Indeks Ketahanan Ekonomi Aplikasi Indeks Kerawanan Sosial yang akan digunakan untuk peningkatan kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Upaya ini juga untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Manfaat dari aplikasi adalah untuk menunjang dan mempermudah pemetaan pemerintah daerah terutama terkait situasi ketahanan ekonomi dan kerawanan sosial yang dibuat secara digitalisasi dalam bentuk aplikasi. Aplikasi tersebut membuat para user atau pengguna yaitu pejabat yang berkewenangan, mudah mengakses kondisi faktual berdasarkan input data dari instansi terkait, maupun data primer yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah maupun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota se Kalimantan Tengah.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2023, sesuai dengan DPPA Nomor 188.44/396/DPPA-SKPD/2023 Tanggal 02 November 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah memiliki anggaran sebesar Rp29.629.835.070,-. Realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2023 per Program sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	
			Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	6.815.193.520	4.983.372.616	73,12
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.169.914.900	1.102.053.694	94,20
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	6.648.838.400	6.534.502.089	98,28
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	247.506.250	241.322.333	97,50
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.590.318.000	1.453.282.864	91,38
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	13.158.064.000	9.227.967.650	70,13
Total		29.629.835.070	23.542.501.246	79,46%

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 dalam kategori baik, namun harus diakui masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi karena itu untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Guna meningkatkan kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran berikutnya akan melaksanakan beberapa hal, antara lain :

1. Pemanfaatan website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan aplikasi-aplikasi yang telah diluncurkan secara maksimal,
2. Pemetaan terhadap daerah rawan konflik di wilayah Kalimantan Tengah,
3. Pengawasan Ormas serta Penguatan Timdu Pengawasan Ormas,
4. Penguatan Peran dan Fungsi Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah Kalimantan Tengah,
5. Penguatan Partisipasi Politik dan peningkatan peran partai politik,
6. Penguatan Peran Toga, Tomas dan Ormas dalam menjaga kerukunan umat beragama,
7. Pelaksanaan Perda P4GN melalui Efektifitas Timdu P4GN, Sosialisasi dan Penyuluhan Perda P4GN,
8. Menguatkan komitmen dari semua Bidang untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 disusun,

dengan harapan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana berakuntabilitas sesuai amanat yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Palangka Raya, Januari 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**Dr. H. M. KATMA F. DIRUN. SE., MM.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661022 199308 1 001**